



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RANCANGAN AWAL RENJA 2022



DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2021-2025.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Renawal Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Putussibau, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP 19700312 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41
3.3. Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V PENUTUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengamanatkan tentang penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan tahunan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dokumen Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berisi program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalamnya juga memuat kebijakan, permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan program-program serta kegiatan sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai

pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026;
- b. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi,

perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

- g. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Anggaran Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 98,52% atau sebesar Rp. 3.378.224.448,00 (*tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) dari total anggaran

dinas sebesar Rp. 3.428.834.300,00 (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), dengan total realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.516.094.198,00 (*satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 99,61% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.522.018.300,00 (*satu milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus rupiah*), sedangkan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 1.862.130.250,00 (*satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau 97,66% dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.906.816.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*).

Realisasi anggaran tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar 96,81% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu senantiasa berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh anggaran dapat terserap maksimal.

Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terrealisasi dengan telah disampaikannya hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Kapuas Hulu dengan nilai “BB” .

Adapun nilai evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman di tahun 2019 telah diterima dengan rata-rata 88 atau kategori hijau (tinggi). Sedangkan di tahun 2020 belum dilakukan penilaian kembali.
- b. Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang ditargetkan 90% sampai dengan akhir tahun 2020 ini terealisasi dengan prosentase 92% (baik).
- c. Sasaran meningkatnya disiplin aparatur dengan indikator kinerja prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun yang ditargetkan 92,5% di triwulan IV terrealisasi 100%. Realisasi kehadiran pegawai dalam 1 tahun ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar jangan sampai menurun di tahun-tahun berikutnya.
- d. Sasaran meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja nilai LAKIP OPD masih dalam proses penyusunan, dan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV dapat terrealisasi sebesar 96,81% atau berhasil memenuhi target kinerja.
- e. Memastikan segala sarana prasarana kerja dan keperluan rutin Dinas dalam keadaan baik dan terpenuhi segala kebutuhan rutin Dinas merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pada Bagian Sekretariat.

2. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanaman Modal dapat dilaporkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan Pemantauan ,Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, hasil yang dicapai yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal berdasarkan dengan indikator jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.
 - b. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah, meskipun tidak dapat merealisasikan keikutsertaan pada kegiatan pameran promosi penanaman modal dikarenakan pandemi yang sedang terjadi, namun berhasil merealisasikan minat investor yang berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1 (satu) minat.
 - c. Kegiatan Pengelolaan SIPID merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah secara terpadu, lengkap dan akurat kepada publik, khususnya calon investor. Dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh calon investor ini, mereka dapat menentukan pilihan dari berbagai alternative peluang investasi yang ada melalui aplikasi SIPID.
 - d. Kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan merupakan kegiatan mengikuti rapat dan pertemuan serta koordinasi teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang menjadi agenda tahunan, yaitu KP3MR dan KP3MN, serta rapat koordinasi teknis di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2020 ini kegiatan rapat koordinasi

yang diikuti hanya di tingkat provinsi Kalimantan Barat mengingat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.

3. Adapun laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan indikator kinerja rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan yang ditargetkan 3-5 hari sudah terealisasi 100%. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi penurunan dan tetap terealisasi 100%.
 - b. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai SKM yang ditargetkan 79 (Baik) terealisasi dengan nilai 85,32 (Baik). Realisasi nilai SKM ini berasal dari total 118 responden sebagai sampel yang merupakan pengunjung DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, dimana maksud kunjungan mereka untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan.
 - c. Jumlah izin tervalidasi selama tahun 2020 sebanyak 701 izin dari kurang lebih 2500 permohonan izin yang didaftarkan melalui OSS dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 81.033.824.000,00 (*delapan puluh satu milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*). Nilai realisasi ini terutama berasal dari 14 sektor PMDN dimana penerbitan izinnya dikelola oleh DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Sedangkan jumlah izin yang

diterbitkan melalui aplikasi SiCantik selama 2020 sebanyak 498 izin yang didominasi dengan penerbitan izin tenaga kesehatan, dan termasuk 31 izin mendirikan bangunan (IMB) yang baru mulai bulan Oktober 2020 penerbitan izinnya dikelola oleh DPMPTSP. Adapun repaitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11					
	Urusan														
	Bidang Urusan														
	PENANAMAN MODAL														
1	02	12	01	01											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	Kegiatan :														
1	02	12	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai / perangko	300	200	200	200	100%	200	600	100%
1	02	12	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan	12	12	12	12	100%	12	48	100%
1	02	12	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak / Tahun	18	11	11	11	100%	12	12	100%
1	02	12	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang dibayar honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	16	16	16	16	100%	16	96	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan												
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10 = (5+7+9)		11	
1	02	12	01	01	027	Peaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD	Jumlah dokumen														
1	02	12	01	01	031	Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen	3	3	3	3	100%	3	12	100%						
1	02	12	01	01	036	Penyediaan Jasa Pendukung perkantoran	Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorarium	3	3	3	3	100%	5	12	100%						
1	02	12	01	01	042	Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	Jumlah paket money	4	4	4	4	100%	4	12	100%						
1	02	12	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
						Kegiatan :															
1	02	12	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan														
1	02	12	01	02	09	Penyediaan sarana pendukung kantor	Jumlah paket penyediaan sarana pendukung kantor														
1	02	12	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12	12	12	12	100%	2	12	100%						
1	02	12	01	03		Peningkatan Disiplin Aparatur															
						Kegiatan :															
1	02	12	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	27	27	-	-	100%	30	87	100%						
1	02	12	01	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	27	-	27	27	100%	-	57	100%						
1	02	12	01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1 02 12 01 01 008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	12	12	12	12	100%	12	48	100%
1 02 12 01 01 009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara / perbaiki	30	17	17	17	100%	17	68	100%
1 02 12 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	50	50	50	50	100%	50	200	100%
1 02 12 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan pengadaan	8	8	8	8	100%	8	32	100%
1 02 12 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	75	75	75	75	100%	75	225	100%
1 02 12 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	7	7	7	7	100%	7	28	100%
1 02 12 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian dan rapat kantor	4.720	6.163	6.163	6.163	100%	6.163	18.489	100%
1 02 12 01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah paket rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	44	45	45	45	100%	50	180	100%
1 02 12 01 01 019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Paket rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	42	42	42	42	100%	45	129	100%
1 02 12 01 01 022	Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD	Jumlah paket kearsipan yang dikelola	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 01 026	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang bayar honorarium	3	3	3	3	100%	5	12	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1 16 02 01 05 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	16	16	16	16	100%	12	64	100%
1 02 12 01 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	Kegiatan :									
1 02 12 01 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 06 002	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	2	2	2	2	100%	2	8	100%
1 02 12 01 06 004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 06 016	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) SKPD	Jumlah dokumen	10	10	10	10	100%	10	40	100%
1 02 12 01 06 026	Pendataan dan pengelolaan aset SKPD	Jumlah dokumen	2	2	2	2	100%	2	8	100%
1 02 12 01 06 030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 06 036	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	4	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1 02 12 01 06 042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 06 047	Penyusunan laporan tahunan	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 06 048	Penyusunan laporan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
	Kegiatan :									
1 02 12 01 15 013	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Jumlah event pameran yang diikuti	2	2	2	2	100%	2	8	100%
1 02 12 01 15 015	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPIID)	Jumlah kegiatan up date data	2	2	2	2	100%	2	8	100%
1 02 12 01 15 019	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	45	45	45	45	100%	45	180	100%
1 02 12 01 16	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
	Kegiatan :									
1 02 12 01 16 013	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	6	6	-	-	100%	-	6	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1 02 12 01 16 020	Rapat koordinasi teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah paket rapat teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal	3	3	3	3	100%	3	12	100%
1 02 12 01 16 019	Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	-	1	-	-	100%	-	1	100%
1 02 12 01 16 021	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	-	-	1	1	100%	-	1	100%
1 02 12 01 19	Peningkatan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan									
	Kegiatan :									
1 02 12 01 19 001	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan	3	3	3	3	100%	4	12	100%
1 02 12 01 19 013	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah laporan	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 19 014	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan keliling	1	1	1	1	100%	1	4	100%
1 02 12 01 19 017	Penataan perizinan	Jumlah dokumen	3	3	3	3	100%	3	12	100%
1 02 12 01 19 019	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	Jumlah publikasi	2	2	2	2	100%	2	8	100%
1 02 12 01 19 020	Penyusunan laporan perkembangan PTSP Kabupaten	Jumlah laporan	1	1	1	1	100%	1	4	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksana urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja maupun hal-hal yang menjadi kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
2. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;

4. Adanya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian dan transparan;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
6. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
7. Penyampaian pelaporan LHKPN dan LHKASN yang tertib;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Beberapa permasalahan pada DPMP TSP Kabupaten Kapuas Hulu yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut, diantaranya :

- 1) belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan dan perkantoran;
- 2) terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia;
- 3) terbatasnya tenaga teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan nilai investasi di daerah.

Sedangkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Predikat SAKIP			CC	B	B	BB	BB		A	A	
2.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat			77	78	79	80	83,71	85,32	80	80	
3.	Nilai realisasi investasi PMDAN (Milyar rupiah)			173	226	299	398	607.50	176,95	398	398	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :

- a) Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dengan indikator kinerja predikat SAKIP “B”, terealisasi dengan predikat “BB” untuk penilaian kinerja tahun 2018. Penilaian SAKIP Tahun 2019 masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2018 karena laporan kinerja DPMPTSP di tahun 2019 belum mendapat penilaian sampai dengan saat ini, adapun untuk tahun 2020 masih dalam tahap penyusunan.
- b) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditargetkan dengan nilai 80 (baik), terealisasi dengan nilai 85,32 (baik) dengan jumlah responden sebanyak 118 orang responden.
- c) Sasaran meningkatkan realisasi investasi di daerah dengan indikator kinerja realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 266 Milyar terealisasi sebesar 176,95 Milyar atau hanya sebesar 59%. Nilai realisasi investasi tersebut merupakan perhitungan sementara yang berasal dari izin tervalidasi OSS dan

perhitungan sementara dari laporan pelaksanaan penanaman modal (LKPM) yang telah disampaikan. Nilai realisasi investasi ini memang menurun dari tahun sebelumnya mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami resesi serta pandemi covid 19 yang masih melanda menyebabkan investasi berjalan sangat lambat. Namun, dengan kondisi saat ini yang semakin membaik akan diharapkan akan berdampak pula terhadap realisasi investasi di daerah.

Dari hasil analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya misi ke 2 daerah yaitu **memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. **Belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap rencana pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan pengembangan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi

di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. **Belum optimalnya upaya promosi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Kurangnya pemahaman akan konsep promosi investasi juga merupakan kendala dalam melaksanakan promosi investasi daerah.
3. **Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha.** Hal ini disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang ada, serta masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.
4. **Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta masih banyaknya jumlah pemilik usaha yang belum memenuhi komitmen.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal

RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026, yang mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru;
3. Adanya perubahan peraturan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di tingkat Nasional;
4. Adanya perubahan peraturan tentang penyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi pengurangan atau penambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP di tahun 2022;
5. Adanya dana alokasi khusus (DAK) non fisik berupa Dana Fasilitas Penanaman Modal TA 2021 yang diperuntukkan bagi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Adapun reviu terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp. 1.410.237.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 1.186.149.400	
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya materai	300 Materai	Rp 1.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya materai	300 Materai	Rp 1.300.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Rp 35.420.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Rp 64.200.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan dinas	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional	Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor	Rp 4.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional	Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor	Rp 4.250.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator	16 Orang	Rp 76.098.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator	16 Orang	Rp 90.180.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya lingkungan gedung kantor	1 Tahun	Rp 29.312.000	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya lingkungan gedung kantor	1 Tahun	Rp 56.011.600	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya peralatan kantor	20 Unit	Rp 21.600.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya peralatan kantor	20 Unit	Rp 20.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	Rp 42.457.000	Penyediaan alat tulis kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	Rp 50.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Item	Rp 14.850.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Item	Rp 17.503.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	75 Buah	Rp 3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	75 Buah	Rp 7.932.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit Laptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer	Rp 250.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit Leptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer	Rp 90.850.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Surat kabar, 10 Kali Iklan	Rp 18.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Surat kabar, 10 Kali Iklan	Rp 19.360.000	
	Kegiatan penunjang pemerintah	, Tentative	Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya	1 Tahun	Rp 30.000.000	Kegiatan penunjang pemerintah	, Tentative	Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya	1 Tahun	-	
	Penyediaan makanan dan minuman > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor	4.720 makanan dan minuman	Rp 54.000.000	Penyediaan makanan dan minuman > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor	4.720 makanan dan minuman	Rp 69.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	50 kali	Rp 466.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah >	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	50 kali	Rp 455.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	30 Kali	Rp 110.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	30 Kali	Rp 75.000.000	
	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa	3 Orang	Rp 3.500.000	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa	3 Orang	Rp 5.863.000	
	Penyusunan RKA dan DPA > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan RKA dan DPA > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	Rp 5.767.000	
	Penyediaan jasa pendukung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya jasa tenaga kontrak	5 Orang	Rp 77.000.000	Penyediaan jasa pendukung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya jasa tenaga kontrak	5 Orang	Rp 101.997.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	20 Kali	Rp 168.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > -	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah rapat	4 Kali	Rp 25.000.000	
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0		Rp 1.711.700.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0		Rp 55.606.800	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional> -	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya kendaraan dinas/operasional kantor	1 Unit mobil	Rp 300.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya kendaraan dinas/operasional kantor	-	-	
	Perencanaan pembangunan gedung kantor>-	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	Rp 250.000.000	Perencanaan pembangunan gedung kantor>-	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunggu	Rp 200.000.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit lemari, 3 unit filling cabinet, 1 unit tangga, 5 unit notebook, 6 unit printer, 2 unit scanner, 4 unit kursi, 10 unit kursi staf, 5 unit rak buku, 1 unit kamera	Rp. 114.451.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya tempat parkir kendaraan	1 Paket	Rp 200.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya tempat parkir kendaraan	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Rp 150.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya gedung kantor	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional> -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit mobil, 8 Unit motor	Rp 100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional >-	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit mobil, 8 Unit motor	Rp 55.606.800	
	Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya instalasi jaringan LAN	1 Paket	Rp 139.700.000	Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya instalasi jaringan LAN	-	-	
	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan	1 Paket	Rp 350.000.000	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan	-	-	
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		0		Rp 88.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur		0		Rp 40.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	29 Stel	Rp 45.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu	29 Stel	Rp 43.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersediany a pakaian khusus hari- hari tertentu	29 Stel	Rp 40.000.000	
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		Rp 395.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		Rp 120.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan formal >-	Tentative	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	Rp 395.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Tentative	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	16 Orang	Rp 120.000.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0		Rp 77.300.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0		Rp 59.578.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 4.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 8.004.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	-	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 4.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 5.265.000	
	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan	2 Dokumen	Rp 12.000.000	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan	2 Dokumen	-	
	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SOP	10 Dokumen	Rp 22.000.000	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SOP	10 Dokumen	Rp 17.894.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan rencana tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000.000	Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 6.189.700	
	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	1 Dokumen	Rp 7.000.000	
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya LPPD SKPD	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya LPPD SKPD	1 Dokumen	-	
	penyusunan laporan tahunan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000	penyusunan laporan tahunan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan tahunan SKPD	1 Dokumen	-	
	Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD	2 Dokumen	Rp 3.800.000	Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD	2 Dokumen	Rp 1.909.600	
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		0		Rp 744.000.000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		0		Rp 469.334.000	
	Pameran investasi daerah > -	Tentative	Terlaksananya pameran investasi daerah	3 Minat investor	Rp 290.000.000	Pameran investasi daerah > -	Tentative	Terlaksananya pameran investasi daerah	3 Minat investor	Rp 252.308.000	
	Penyusunan data statistik penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya data statistik penanaman modal	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan data statistik penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya data statistik penanaman modal	1 Dokumen	-	
	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID)	2 Kegiatan	Rp 20.000.000	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID)	2 Kegiatan	Rp 47.026.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > -	Tentative	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Perusahaan	Rp 279.000.000	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > -	, Tentative	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Perusahaan	Rp 170.000.000	
	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal	450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD	Rp 80.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal	450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD	-	
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		0		Rp 520.000.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		0		Rp 520.000.000	
	Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	30 Perusahaan	Rp 50.000.000	Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	30 Perusahaan	-	
	Sosialisasi kebijakan penanaman modal > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal	50 Perusahaan	Rp 34.000.000	Sosialisasi kebijakan penanaman modal > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya a sosialisasi kebijakan penanaman modal	50 Perusahaan	-	
	Penyusunan Perubahan Perda PM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal	1 Dokumen	-	Penyusunan Penyusunan Perubahan Perda PM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal	1 Dokumen	Rp. 391.406.000	
	Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	1 Dokumen	-	Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	1 Dokumen	Rp. 350.000.000	
	Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	Tentative	Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	3 Kali	Rp 85.000.000	Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	Tentative	Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	3 Kali	Rp 59.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 201.600.000	
8	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		0		Rp 688.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		0		Rp 688.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > -	, Tentative	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	5 Kecamatan	Rp 178.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > -	, Tentative	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	5 Kecamatan	Rp 116.954.600	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > -	, Tentative	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH	3 Kecamatan	Rp 234.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > -	, Tentative	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH	3 Kecamatan	Rp 55.597.800	
	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SKM OPD	Baik	Rp 87.000.000	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SKM OPD	Baik	Rp 35.000.000	
	Penataan perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penataan perizinan	1 Dokumen	Rp 64.000.000	Penataan perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penataan perizinan	1 Dokumen	Rp 74.776.800	
	Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > -	Kab. Kapuas Hulu	Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Pengaduan	Rp 25.000.000	Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > -	Kab. Kapuas Hulu	Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Pengaduan	Rp -	
	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Publikasi	Rp 100.000.000	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Publikasi	Rp 175.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 belum dilaksanakan . Namun berdasarkan tahun–tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapat masukan program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perizinan berusaha, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian "pelayanan terpadu satu atap". Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian "pelayanan terpadu satu atap" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD).

Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan ” payung” tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun
2. izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
3. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
4. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
5. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis *web* yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2 : Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimalkan promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimalkan proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati maka dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis yang dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung oleh program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 2 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal.

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing,

yang mana didukung dengan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Promosi Penanaman Modal;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Penanaman Modal.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode Renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran DPMP TSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76	77	78	79	80
2.	Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	112	139	173	226	299	398

Tabel diatas menunjukkan indikator predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 ditargetkan berpredikat "BB". Sedangkan indikator Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) tahun 2021 ditargetkan dengan nilai Baik (80 poin), serta indikator nilai realisasi investasi ditargetkan sebesar 398 Milyar.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
 - f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD,
 - h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai,
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai,
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,
 - g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,

- h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pengadaan Mebel,
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pengadaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pemeliharaan Mebel,
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim penanaman modal agar kondusif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sub kegiatan :
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan promosi penanaman modal agar dapat berjalan efektif, lancar dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal,
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Hasil yang diharapkan dari program Pelayanan Penanaman Modal adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program pelayanan penanaman modal ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,

yang terdiri dari sub kegiatan :

- a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
- b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Program pengendalian penanaman modal bertujuan untuk mendorong tertib administrasi bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal. Program ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi penanaman modal sehingga dapat disajikan dan digunakan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan baik di daerah maupun provinsi. Program ini dapat dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 6 (enam) Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program tersebut adalah :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,

- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
 - e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
 - g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai,
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,

- d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai,
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,
 - g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,
 - h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pengadaan Mebel,
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pengadaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

- f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - b) Pemeliharaan Mebel,
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim penanaman modal agar kondusif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sub kegiatan :
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan promosi penanaman modal agar dapat berjalan efektif, lancar dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal,
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Hasil yang diharapkan dari program Pelayanan Penanaman Modal adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program pelayanan penanaman modal ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,

yang terdiri dari sub kegiatan :

- a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
- b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Program pengendalian penanaman modal bertujuan untuk mendorong tertib administrasi bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal. Program ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi penanaman modal sehingga dapat disajikan dan digunakan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan baik di daerah maupun provinsi. Program ini dapat dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder*. Rumusan rencana program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPPTSP TAHUN ANGGARAN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN KAPUAS HULU**

1	2	3	4	Rencana tahun 2022				8	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				5	6	7	9		10	
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan , Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Urusan Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.848.844.116	DAU/DAK			6.433.728.528
Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL					5.848.844.116	DAU/DAK			6.433.728.528
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tindakan lanjut hasil pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu		3.647.199.030	DAU			4.011.918.933
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai evaluasi pelayanan publik	Kab. Kapuas Hulu		385.440.000	DAU			423.984.000
Belanja Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai/perangko	Kab. Kapuas Hulu	200 buah	2.640.000	DAU		200 buah	2.904.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, PDAM, Telepon dan Internet / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	12 bulan	66.000.000	DAU		12 bulan	72.600.000
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkan gaji tenaga kontrak	Kab. Kapuas Hulu	12 bulan	316.800.000	DAU		12 bulan	348.480.000
Penyediaan Makanan dan Minuman										-
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor										-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.950.006	DAU			40.645.007
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	15 unit	4.950.000	DAU		20 unit	5.445.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	0	-	DAU		20 unit	20.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	20 unit	32.000.000	DAU		20 unit	35.200.000
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	0	-	DAU		1 paket pemeliharaan jaringan internet	15.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	0	-	DAU		1 paket pemeliharaan gedung	15.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	0	-	DAU		1 paket pemeliharaan prasarana pendukung gedung	20.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					361.600.006	DAU			397.760.007
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan disediakan	Kab. Kapuas Hulu	-	-	DAU		4 unit motor	120.000.000
Pengadaan Mebeleur		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1 meja rapat oval besar, 40 kursi rapat direksi, 6 kursi ess IV, 32 kursi staf, 10 meja staf	165.000.000	DAU		10 buah rak arsip, 10 unit filing kabinet, 3 unit kursi ruang tunggu, 3 set kursi/sofa ruang tamu	181.500.000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya disediakan	Kab. Kapuas Hulu	2 unit AC standing, 10 unit AC split, 1 unit LCD 50", 4 kamera CCTV tambahan, 2 unit PC all in 1	116.150.000	DAU		10 unit laptop, 6 unit AC split, 2 unit PC all in 1	127.765.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1 paket desain interior gedung dan ruang pelayanan	35.000.000	DAU		-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Perencanaan pembangunan gedung kantor										
Pembangunan Gedung Kantor									-	-
Penyediaan sarana pendukung Gedung Kantor		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1 paket instalasi & penambahan daya listrik, 1 paket pemindahan jaringan PDAM, 1 paket pemindahan jaringan Telkom & Indihome	45.450.000	DAU		-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					377.111.006	DAU			414.822.107
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item disediakan	Kab. Kapuas Hulu	12 item	51.022.000	DAU		12 item	56.124.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item disediakan	Kab. Kapuas Hulu	55 item	59.746.000	DAU		55 item	65.720.600
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item disediakan	Kab. Kapuas Hulu	3 lusin gelas minum harian, 3 lusin gelas tamu, 2 unit dispenser air	6.600.000	DAU		1 unit magiccom, 3 unit dispenser panas dingin,	7.260.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item disediakan	Kab. Kapuas Hulu	15 item	57.743.000	DAU		15 item	63.517.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah item disediakan	Kab. Kapuas Hulu	5 item	11.000.000	DAU		5 item	12.100.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi	Kab. Kapuas Hulu	50 kali	143.000.000	DAU		50 kali	157.300.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah										

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Kearsipan Dinas		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase arsip dinamis di tata	Kab. Kapuas Hulu	terkelolanya arsip dinamis SKPD 90%	24.000.000	DAU		terkelolanya arsip dinamis SKPD 95%	26.400.000
Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bentuk dukungan	Kab. Kapuas Hulu	tersedianya dukungan SPBE	24.000.000	DAU		tersedianya dukungan SPBE	26.400.000
Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan										-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					225.964.006	DAU			248.560.407
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai disediakan	Kab. Kapuas Hulu	-	-	DAU		32 stel	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya disediakan	Kab. Kapuas Hulu	32 stel	27.200.000	DAU		32 stel	29.920.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu										
Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	8.400.000	DAU		1 dokumen	9.240.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	5.700.000	DAU		1 dokumen	6.270.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai disediakan	Kab. Kapuas Hulu	32 dokumen	5.700.000	DAU		32 dokumen	6.270.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kab. Kapuas Hulu	10 orang	45.440.000	DAU		10 orang	49.984.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	10 orang	65.364.000	DAU		10 orang	71.900.400

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Kab. Kapuas Hulu	10 orang	68.160.000	DAU		10 orang	74.976.000
Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD										-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.820.000	DAU			7.502.000
Penyusunan Inventarisasi aset SKPD		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.081.238.006	DAU			2.289.361.807
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dibayarkan gaji ASN	Kab. Kapuas Hulu	12 bulan	1.906.816.000	DAU		12 bulan	2.097.497.600
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang dibayarkan honor penatausahaan keuangan	Kab. Kapuas Hulu	9 orang	124.960.000	DAU		9 orang	137.456.000
Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa										
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) SKPD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	26.558.000	DAU		1 dokumen	29.213.800
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	8.042.000	DAU		1 dokumen	8.846.200
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	8.042.000	DAU		1 dokumen	8.846.200
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					172.076.000	DAU			189.283.600
Penyusunan Renstra SKPD		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	48.836.000	DAU		2 dokumen	53.719.600
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD										
Penyusunan Rencana Kerja SKPD										
Penyusunan RKA, DPA, DPPA		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	3.410.000	DAU		1 dokumen	3.751.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	109.600.000	DAU		1 dokumen	120.560.000
Penyusunan Laporan Tahunan										-
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD										-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 dokumen	91.736.000,10	DAU		2 dokumen	100.909.600
Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi										-
Penilaian Kualitas Pelayanan Publik										-
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD										-
Kegiatan Penunjang Pemerintah Lainnya										-
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					757.969.000	DAU			833.765.900
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					757.969.000	DAU			833.765.900
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	391.286.000	DAU			-
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	366.683.000	DAU		1 dokumen	403.351.300
Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)										-
Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal										-
Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan										-
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana OSS dan SiCantik Kab. KH										-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal										-
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					531.368.200	DAU			584.505.020
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					531.368.200	DAU			584.505.020
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	275.000.000	DAU		1 dokumen	302.500.000
Pameran Investasi Daerah		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 event	256.368.200	DAU		3 event	282.005.020
Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal										-
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal										-
Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal										-
Rapat Koordinasi teknis perencanaan penanaman modal										-
Penyusunan rencana kebutuhan investasi										-
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					545.121.506	DAK/DAU			599.633.657
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					545.121.506	DAK/DAU			599.633.660
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dipantau	Kab. Kapuas Hulu	50 perusahaan	244.290.200	DAK/DAU		50 perusahaan	268.719.220

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dibina/Jumlah peserta bimtek/sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	50 perusahaan	63.910.000	DAK		50 perusahaan	70.301.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan diawasi	Kab. Kapuas Hulu	50 perusahaan	236.921.300	DAK		50 perusahaan	260.613.430
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					216.162.320	DAU			237.778.552
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					216.162.320	DAU			237.778.552
Pengadaan SIMYANDU		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disediakan	Kab. Kapuas Hulu	prosentase pelaku usaha terlayani100%	129.379.580	DAU		prosentase pelaku usaha terlayani100%	142.317.538
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau	Kab. Kapuas Hulu	50 pelaku usaha	28.927.580	DAU		50 pelaku usaha	31.820.338
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling										
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Kab. Kapuas Hulu	Prosentase terlayani konsultasi 100%	28.927.580	DAU		Prosentase terlayani konsultasi 100%	31.820.338
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 dokumen	28.927.580	DAU		1 dokumen	31.820.338
Penataan Perizinan										-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri 13/2006)	Urusan, Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					151.024.060	DAU			166.126.466
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					151.024.060	DAU			166.126.466
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disediakan	Kab. Kapuas Hulu	6 konten, 8 dokumen	151.024.060	DAU		9 konten, 8 dokumen	166.126.466
Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan										-
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD										-
Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten										-
Jumlah						5.848.844.116				6.433.728.528

Putussibau, Januari 2021
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710312 199101 1 001

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparaturnya secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022.
4. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, transparansi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun catatan penting yang menjadi saran bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPMP TSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun

2018 adalah :

1. Agar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu memimpin perubahan guna meningkatkan kinerja yang lebih baik agar tercipta penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu agar meningkatkan integritas, disiplin dan profesionalisme kerja, serta menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja dan standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.



dpmptsp
KAPUAO HULU

